

Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat

Silviana

Universitas Widyatama

ABSTRACT

The study analyzed the influence of Chief Local Government Commitment on the Financial Statement Local Government Quality. Study on 27 Local Government at West Java Province.

The method of analysis used is explanatory research. The data collected by using survey technique and distributing questionnaires to 54 auditors in the audit Board of The Republic of Indonesia – representative office of west Java Province. Simple regression linear has been applied for hypotheses testing.

The result showed that the Chief Local Government Commitment have a positive and significant influenced on Financial Statement Local Government Quality.

Keyword: local chief commitment, local quality financial statement

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan mulai bergeser dari *Government to Governance*. Tata pemerintahan yang baik, sangat erat kaitannya dengan reformasi dalam bidang birokrasi, penegakan hukum, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perubahan *mind-set* dan *culture-set*, serta perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, menjadi lebih produktif, efisien dan efektif. (Solikin, 2005).

Dalam rangka mewujudkan *good governance* baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah, telah dilakukan beberapa upaya-upaya yang diantaranya; pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2005 telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputi yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menuntut suatu perubahan mendasar (*change*) di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. (Nasution, 2009).

Untuk dapat mencapai penyelenggaraan pemerintahan negara yang memenuhi kriteria *good governance* tersebut, diperlukan adanya komitmen pimpinan. Komitmen memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya (Mowday, 1987). Kontribusi yang berarti dalam hal pengelolaan keuangan negara adalah menghasilkan laporan keuangan yang transparan untuk menyajikan dan mengungkapkan semua transaksi keuangan dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pemda dengan harapan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang telah disusun pemda sudah wajar atau belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, tentunya diperlukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 E dinyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, kemudian diterbitkan UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

Sebagai pihak independen, setelah tahun anggaran berakhir, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Setelah melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk rekomendasi dan temuan. DPRD dan pemda diminta untuk menyikapi laporan hasil pemeriksaan dalam bentuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK.

Fenomena yang menunjukkan gambaran komitmen kepala daerah dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dapat dilihat dari Rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2010 di Provinsi Jawa Barat terlihat pada tabel 1.1. berikut ini:

Tabel. 1.1 Tindak Lanjut Hasil Temuan (dalam rupiah)

Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
66.933	Rp68.009.821,11	24.578	Rp17.792.635,11	16.075	Rp27.633.228,64	26.280	Rp22.583.957,35	Rp807.827,13
-	USD 473.75	-	USD 4.00	-	USD 2.83	-	USD 466.91	USD 4.00

Sumber: IHPS BPK RI semester II TA 2010

Sumber: IHPS BPK RI semester II TA 2010

Gambar 1. Grafik pemantauan tindak lanjut

Dari tabel rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut di atas, masih ada rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti, hal ini menunjukkan Kepala Daerah belum sepenuhnya memenuhi komitmen untuk menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disarankan BPK RI.

Saat ini perkembangan laporan keuangan atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan, hal ini terlihat dari opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat.

Dari hasil pemeriksaan BPK RI, rekapitulasi perkembangan opini LKPD tahun 2006 – 2010 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Opini LKPD tahun 2006 – 2010

Khusus untuk Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, perkembangan Opini LKPD pada Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Opini LKPD TA 2006 - 2009
Provinsi Jawa Barat

No	Objek Pemeriksaan	Opini LKPD TA 2006	Opini LKPD TA 2007	Opini LKPD TA 2008	Opini LKPD TA 2009
1	Provinsi Jawa Barat	WDP	WDP	WDP	WDP
2	Kabupaten Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Kabupaten Cianis	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kabupaten Sumedang	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kabupaten Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kabupaten Karawang	WDP	DISCLAIMER	WDP	WDP
7	Kota Depok	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kabupaten Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP
9	Kabupaten Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Kota Banjar	WDP	WTP	WDP	WDP

11	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	DISCLAIMER
13	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	DISCLAIMER
14	Kota Cirebon	WDP	DISCLAIMER	WDP	WDP
15	Kabupaten Subang	WDP	DISCLAIMER	WDP	WDP
16	Kabupaten Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP
17	Kota Cimahi	WDP	WDP	WDP	WDP
18	Kabupaten Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP
19	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kabupaten Bandung Barat	-	-	DISCLAIMER	DISCLAIMER
21	Kabupaten Kuningan	WDP	WDP	WDP	WDP
22	Kabupaten Majalengka	WDP	WDP	WDP	WDP
23	Kabupaten Cianjur	WDP	DISCLAIMER	WDP	DISCLAIMER
24	Kabupaten Garut	WDP	DISCLAIMER	WDP	WDP
25	Kabupaten Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP
26	Kabupaten Indramayu	WDP	DISCLAIMER	WDP	WDP
27	Kota Tasikmalaya	WDP	DISCLAIMER	WDP	WDP

Sumber: IHPS BPK RI semester II tahun 201

Dari hasil pemeriksaan BPK dikemukakan beberapa penyebab laporan keuangan pemerintah belum andal dan berkualitas diantaranya Sistem Pengendalian Internal masih lemah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dilaksanakan. Penerapan sistem akuntansi tidak konsisten atau sering berubah-ubah, pola pikir para pejabat yang masih belum sesuai dengan maksud dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2010 LKPD dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah komitmen Kepala Daerah terutama komitmen untuk menyajikan informasi yang andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang diwujudkan dengan komitmen segera menindaklanjuti rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaruh komitmen kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komitmen kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Komitmen

Teori yang mendasari komitmen adalah teori komitmen organisasi. Komitmen organisasi sudah mulai diperkenalkan oleh Etzioni pada tahun 1961, istilah ini semakin populer sejak tahun 1977 setelah dibahas oleh Staw & Salancik, yang mengajukan dua bentuk komitmen, yaitu komitmen sikap (*attitudinal commitment*) dan komitmen tingkah laku (*behavioral commitment*). Komitmen sikap adalah keadaan dimana individu mempertimbangkan sejauhmana nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi, serta sejauhmana keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen tingkah laku didasarkan pada sejauhmana karyawan menetapkan keputusan untuk terikat pada organisasi berkaitan dengan adanya kerugian jika memutuskan melakukan alternatif lain di luar pekerjaannya saat ini.

Steers, et.al (1974) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai: *the relative strength of an individual's identification with and involvement in a particular organization*. Definisi menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Karakteristik komitmen organisasi ada tiga faktor yaitu 1) percaya dan menerima tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi; 2) kesediaan untuk memfokuskan upaya pada membantu organisasi mencapai tujuan, dan 3) keinginan untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Mowday, et. al (1979), lebih lanjut menyatakan "ketika karyawan mengidentifikasi tujuan tertentu organisasi dan dalam rangka mempertahankan keanggotaan dan memfasilitasi tujuan organisasi" menunjukkan komitmen karyawan terhadap organisasi.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Komitmen kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2004, pasal 20 ayat 1 – 3 dinyatakan:

1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
3. Jawaban atau penjelasan tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pada pasal 20 ayat (1) juga dinyatakan tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi, dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP), dapat dilakukan pimpinan dengan cara berikut:

- 1) Pimpinan telah menetapkan pegawai yang bertugas menyelesaikan TLHP
- 2) Pimpinan telah memiliki mekanisme atau prosedur secara tertulis guna menindaklanjuti temuan atau rekomendasi LHP intern maupun ekstern
- 3) Pimpinan Unit Kerja telah memantau dan mengawasi tindak lanjut atas temuan hasil audit dan telah mencegah agar tidak terjadinya temuan yang sama pada tahun berikutnya.
- 4) Pimpinan secara berkala menyampaikan perkembangan penanganan TLHP kepada BPK dan DPRD.

Manfaat pemantauan rekomendasi dan TLHP, untuk meminimalisir adanya kejadian yang berulang dalam laporan-laporan keuangan yang telah diaudit BPK. Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektifitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggungjawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK (SPKN, 2007)

Sesuai ketentuan pasal 20 ayat 3 UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, paling lambat 60 hari sejak LHP diterima, kepala daerah berkewajiban menyampaikan perkembangan tindak lanjut yang dilakukan. BPK memantau tindak lanjut hasil temuan yang sudah ditindaklanjuti, sedang ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti. BPK juga mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut temuan kepada DPRD setiap pemeriksaan semester.

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, seandainya pimpinan atau kepala daerah tidak menanggapi rekomendasi dan tindak lanjut hasil temuan, di dalam UU No 15 tahun 2005 pasal 20 ayat 5 dinyatakan; pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BPK harus menilai apakah manajemen telah menyiapkan secara memadai suatu sistem pemantauan TLHP yang dilakukan oleh berbagai pemeriksa baik intern maupun ekstern pada entitas tersebut. BPK juga memastikan bahwa seluruh lini manajemen entitas telah mengetahui dan memantau TLHP yang terkait dengan unit di bawah kendalinya. Pemantauan dilakukan oleh manajemen dan bukan hanya oleh pengawas entitas yang bersangkutan. (SPKN, 2007)

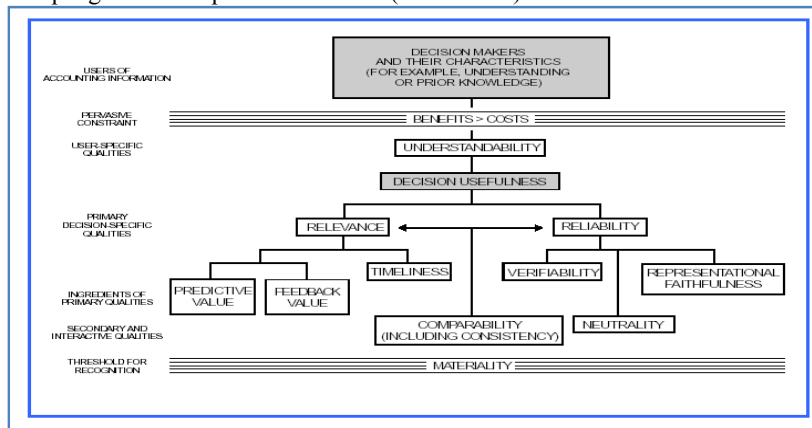
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Masmudi, 2003).

Laporan keuangan memainkan peran penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada publiknya dalam masyarakat yang demokratis, oleh karenanya kewajiban memuat laporan keuangan dimuat dalam UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, dan PP 108/2000 tentang pertanggungjawaban kepala daerah.

Di dalam Standar Akuntansi Pemerintah (PP nomor 24 tahun 2005) PSAP Nomor 01 disebutkan komponen-komponen laporan keuangan terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca; 3) Laporan Arus Kas; 4) Catatan Atas laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berguna dalam meyakinkan bahwa informasi keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi (FASB 1980).



Sumber: SFAC No. 2 (FASB 1980). Gambar 2.1 Hirarki Kualitas Akuntansi

Jenis Opini Laporan Keuangan dapat menjadi salah satu ukuran tingkat keandalan suatu Laporan Keuangan dapat dijadikan dasar didalam proses pengambilan keputusan ekonomi suatu entitas. Selain Opini,

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan juga dapat menjadi dasar pertimbangan tambahan yang sifatnya kualitatif didalam pengambilan keputusan (Syafri, 2011).

McDaniel *et. al* (2002) dalam artikelnya yang berjudul *evaluating financial reporting quality*, menyatakan untuk menilai kualitas laporan keuangan menggunakan tiga karakteristik yaitu *relevance*, *reliability* dan *comparability*

Ferdy van Beest, *et. al* (2009) menulis artikel dengan judul *Quality of Financial Reporting: measuring qualitative characteristics*. Dalam artikel dinyatakan mereka membangun sebuah alat ukur komprehensif untuk menilai kualitas pelaporan keuangan dalam hal karakteristik kualitatif yang mendasar (misalnya *relevan*) dan meningkatkan karakteristik kualitatif (*understandability*, *comparability*, dan *verifiability*) seperti yang didefinisikan dalam Kerangka Konseptual untuk Pelaporan Keuangan dari FASB (2008).

Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut SAP (PP 24 tahun 2005) yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*).

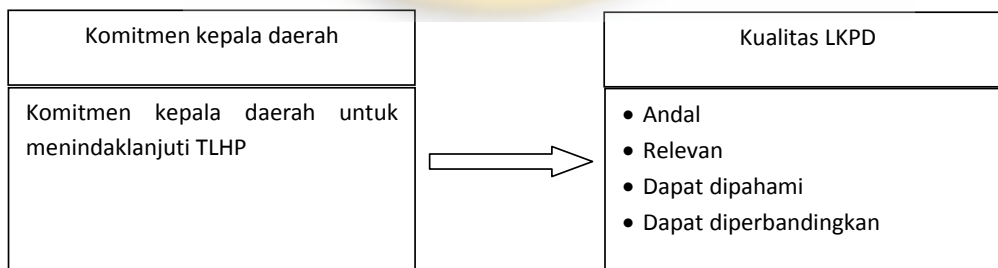
Hubungan Kepala Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan

LKPD yang belum mendapatkan opini WTP perlu perbaikan, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari kepala daerah dan seluruh jajarannya. Terkait opini LKPD, Opini WTP tidaklah dapat diperoleh secara instan dan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus diwujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik. “Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik termasuk komitmen pimpinan daerah dan jajarannya. (Kurniawan, 2011)

Menurut Rezaee (2003) perusahaan harus mengembangkan sebuah model *"the six legged stool"* yang mendukung pertanggungjawaban dan keandalan laporan keuangan. Setiap peserta dalam proses merupakan *one legged stool*, mendukung salah satu tujuan yaitu menghasilkan laporan berkualitas tinggi. *The six legged stool* model didasarkan pada partisipasi aktif dari semua pihak dan mendorong perbaikan berkelanjutan, terdiri dari : 1) *Board of Director*, 2) *Top Management Team* 3) *Audit Internal*; 4) *External Audit*; 5) *Governing Bodies*. Menyelaraskan kepentingan manajer dan *stakeholder* membutuhkan kewaspadaan, independensi, dan keefektifan dewan. Dewan direksi tidak terlibat dalam kegiatan rutinitas manajemen, namun memiliki peran unik untuk mengawasi, memantau, dan mengendalikan kegiatan manajemen.

Dewan harus memantau rencana manajemen, keputusan, dan kegiatan dan bertindak secara independen. *Tone* yang ditetapkan oleh dewan direksi biasanya mempengaruhi perilaku orang lain dalam perusahaan. Dewan direksi yang tidak efektif akan menyebabkan penipuan laporan keuangan mungkin terjadi. Sebuah dewan dapat tidak efektif ketika manajemen mengesampingkan tanggung jawab pemantauan dewan. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit yang dimasukan dalam unsur penilai kinerja manajer dapat mendorong temuan audit dapat diselesaikan. (Hartono, 2006).

Model Konseptual Penelitian



Gambar 2.2 pengaruh komitmen kepala daerah terhadap kualitas LKPD

Hipotesis Penelitian

Terdapat pengaruh komitmen kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil adalah 27 Pemerintah Daerah yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, semua populasi diteliti sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus. (Arikunto, 2010).

Variabel dan Pengukurannya

Variabel independen dalam penelitian ini adalah komitmen kepala daerah, Pengukuran komitmen kepala daerah, dikembangkan dari konsep rekomendasi dan TLHP sesuai UU nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari 10 item pernyataan 5 (lima) poin skala Likert.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas LKPD. Pengukuran Kualitas LKPD dilakukan dengan menggunakan instrumen berdasarkan empat aspek paling dominan dalam studi kualitas laporan keuangan menurut SAP (PP 24 tahun 2005) yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan, terdiri dari 10 item pernyataan 5 (lima) poin skala Likert.

Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Merupakan penelitian penjelasan (*explanatory research*), untuk menjelaskan hubungan melalui pengujian hipotesis (Singarimbun, 1995). Metode penelitian yang digunakan adalah sensus, semua populasi dijadikan objek pengamatan. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang mengaudit 27 pemda di Jawa Barat tahun anggaran 2010. Alasan pemilihan responden adalah auditor BPK yang melakukan pemeriksaan atas LKPD dan yang memantau sejauhmana Kepala Daerah berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi dan tindak lanjut pemeriksaan BPK. Jumlah responden 54 auditor (yang terdiri dari Ketua Tim audit dan anggota tim audit). Dari 54 kuesioner yang disebar, semuanya kembali dan dapat digunakan.

Metode Analisis Data

Untuk menganalisis pengaruh komitmen kepala daerah terhadap kualitas LKPD digunakan analisis regresi sederhana. Untuk menguji hipotesis digunakan Uji Signifikansi Parameter (Uji Statistik t). Langkah pertama, dilakukan Uji Kualitas Data terdiri dari Uji Validitas dan Reliabilitas. Pengujian validitas menggunakan metode *Korelasi Product Moment Karl Pearson*. Dengan *degree of freedom*(df) = (n-2) dan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$), kriteria pengujianya adalah jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut valid atau jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Uji Reliabilitas menggunakan metode *Alpha Cronbach*. Dengan *degree of freedom*(df) = (n-2) dan $\alpha = 0,05$ maka jika r_{alpha} positif dan $r_{alpha} > r_{tabel}$, pertanyaan dinyatakan reliabel atau jika r_{alpha} positif dan $r_{alpha} \leq r_{tabel}$, pertanyaan dinyatakan tidak reliabel. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Regresi Linier sederhana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Kepala Daerah (x)

Dari 10 item pernyataan, nilai r_{hitung} 10 (sepuluh) item pernyataan, dinyatakan valid karena r_{hitung} -nya lebih besar dari r_{tabel} (0,388) dengan taraf kepercayaan 95%.

b. Hasil Uji Validitas Kualitas LKPD (y)

Seluruh item pernyataan yaitu 10 (sepuluh) item pernyataan, 10 item dinyatakan valid karena r_{hitung} -nya lebih besar dari r_{tabel} (0,388) dengan taraf kepercayaan 95%

c. Hasil Uji Reliabilitas

Dari hasil uji reliabilitas, didapatkan r_{hitung} x (0,566), dan y (0,479), lebih besar dari r_{tabel} (0,388), artinya seluruh variabel penelitian dapat dikatakan reliabel.

Hasil Uji Hipotesis & Pembahasan

Analisis Regresi Linier sederhana

Hasil analisis regresi linier sederhana dengan dibantu SPSS 11.5 *for windows* mendapatkan model persamaan regresi linier sederhana $y = 44,654 + 0,164 x$

Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis

Dari hasil perhitungan SPSS 11.5 *for windows*, nilai t_{hitung} (2,135) > t_{tabel} (2,060), t_{tabel} ($\alpha = 0,05$ dan df = 25) dan signifikansi sebesar (0,020) lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka variabel komitmen kepala daerah berada pada daerah penolakan H_0 . Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh komitmen kepala daerah terhadap kualitas LKPD diterima.

Pembahasan

Pembahasan untuk persamaan regresi linear

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $y = 44,654 + 0,164 x$. Secara statistik persamaan regresi di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar **44,654** artinya jika komitmen kepala daerah (x), bernilai nol, maka nilai kualitas LKPD (y) akan sebesar **44,654**.
- Koefisien regresi variabel komitmen organisasi (x) menunjukkan nilai positif yaitu sebesar **0,164**. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen kepala daerah (x) berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD (y), artinya semakin tinggi tingkat komitmen kepala daerah (x) akan menyebabkan semakin tinggi kualitas LKPD (y).

Hal ini dapat terjadi apabila kepala daerah berkomitmen untuk segera menyelesaikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK, misalnya mengadakan pertemuan dan

mengkomunikasikan rekomendasi dan hasil temuan dengan pihak-pihak terkait (SKPD, inspektorat), bersama-sama berkomitmen untuk mengurangi ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, melakukan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang selaras dengan standar akuntansi pemerintah, meminta pendampingan, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang mengerti pengelolaan keuangan negara (misal dari BPKP, BPK), bagaimana cara untuk mendapatkan opini WTP, apa saja yang harus segera diperbaiki, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat COSO (2009), Jika kinerja pimpinan organisasi baik, maka seluruh komponen akan menyatu (*built in*) dan saling menjalin (*permeated*) di dalam proses manajemen. COSO mengakui suatu "*tone on the top*", oleh karena itu pimpinan organisasi tetap ditekankan untuk mengambil peranan yang sangat penting dalam memimpin organisasi untuk mencapai tujuan.

Selaras juga dengan penelitian (Rezaee, 2003) dimana dinyatakan menyelaraskan kepentingan manajer dan *stakeholder* membutuhkan kewaspadaan, independensi, dan keefektifan dewan. Dewan direksi tidak terlibat dalam kegiatan rutinitas manajemen, namun memiliki peran unik untuk mengawasi, memantau, dan mengendalikan kegiatan manajemen. Dewan harus memantau rencana manajemen, keputusan, dan kegiatan dan bertindak secara independen. *Tone* yang ditetapkan oleh dewan direksi biasanya mempengaruhi perilaku orang lain dalam perusahaan. Dewan direksi yang tidak efektif akan menyebabkan penipuan laporan keuangan mungkin terjadi. Sebuah dewan dapat tidak efektif ketika manajemen mengesampingkan tanggung jawab pemantauan dewan.

Suatu komitmen organisasional menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi Steers, et. al (1974) dan Trisnaningih (2004) mengemukakan jika seseorang yang bergabung dengan suatu organisasi tentunya membawa keinginan-keinginan, kebutuhan dan pengalaman masa lalu yang membentuk harapan kerja baginya, bersama-sama dengan organisasinya berusaha mencapai tujuan bersama dan untuk bekerja sama dan berprestasi kerja dengan baik, seorang harus mempunyai komitmen yang tinggi pada organisasinya.

Pembahasan untuk uji hipotesis

Dari perhitungan uji t untuk hipotesis nilai $t_{hitung} (2,135) > t_{tabel} (2,060)$, $t_{tabel} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 25)$ dan signifikasi sebesar $(0,02) < \alpha = 0,05$ menunjukkan ada pengaruh signifikan komitmen kepala daerah terhadap kualitas LKPD. Dengan demikian, hasil uji ini mendukung pernyataan hipotesis yang menyatakan ada pengaruh komitmen kepala daerah terhadap kualitas LKPD.

Dari sepuluh butir pernyataan mengenai komitmen kepala daerah terutama komitmen untuk Rekomendasi dan TLHP BPK, dapat disimpulkan kepala daerah cukup merespon Rekomendasi dan TLHP BPK RI dengan cara: 1) membentuk tim analisa penyebab temuan untuk menganalisis Rekomendasi dan TLHP BPK yang masih tersisa dari tahun anggaran berjalan maupun sebelumnya sebagai upaya meraih opini WTP; 2) memiliki SOP/Pedoman TLHP BPK; 3) membuat rencana aksi TLHP; 4) mensosialisasikan rencana aksi TLHP BPK; 5) berkonsultasi dengan BPK atas TLHP yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan; 6) menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK; 7) menindaklanjuti dengan membuat melengkapi/ mempertanggungjawabkan dan atau menyetero uang kas daerah sesuai rekomendasi BPK RI; 8) melaporkan hasil TLHP kepada DPRD; 9) melaporkan hasil TLHP kepada BPK RI; 10) memberi teguran lisan dan sanksi, atas keterlambatan penyampaian tanggapan disebabkan oleh kelalaian petugas dan/atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Sedangkan untuk sepuluh butir pernyataan kualitas LKPD, dapat disimpulkan LKPD pemda cukup berkualitas, ditunjukkan dengan pernyataan LKPD telah 1) menggunakan perkiraan dan istilah yang selaras dengan SAP sehingga dapat dipahami, 2) menggunakan TCA (*cash basis* untuk LRA dan *Accrual* untuk neraca), 3) memuat penjelasan akun dan kebijakan akuntansi di CaLK, 4) dapat membandingkan anggaran dan LKPD periode sebelumnya dengan periode yang diaudit, 5) konsisten menggunakan kebijakan akuntansi sesuai SAP, 6) inspektorat mereviu LKPD sebelum diserahkan ke BPK RI, 7) berkeinginan memperoleh opini WTP untuk menjamin keandalan informasi LKPD, 8) LKPD yang disajikan lengkap sesuai ketentuan SAP, 9) LKPD disajikan tepat waktu; 10) informasi LKPD dapat digunakan untuk menyusun perencanaan dan anggaran tahun anggaran berikutnya.

Hasil analisis pengujian secara keseluruhan menunjukkan nilai *R Square* sebesar (0.034), berarti variasi perubahan kualitas LKPD dapat dijelaskan oleh variabel komitmen kepala daerah sebesar (3,40) persen dan sisanya yaitu (97,60) persen dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel komitmen kepala daerah. Hasil ini menunjukkan variabel komitmen kepala daerah sangat rendah bisa menjelaskan kualitas laporan keuangan, kemungkinan hal ini disebabkan TLHP belum sepenuhnya ditindaklanjuti, karena masih ada temuan yang belum ditindaklanjuti dari tahun anggaran sebelumnya dan pada tahun berjalan dan masih ada temuan berulang, masih ada SKPD yang belum ditegur berkaitan dengan kelalaian terhadap pihak ke tiga, untuk LKPD masih ada LKPD yang belum tepat waktu, masih ada prosedur akuntansi yang belum selaras dengan SAP, kemungkinan lain disebabkan faktor-faktor yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini diantaranya 1) *Board of Director*, 2) *Top Management Team* 3) *Audit Internal*; 4) *External Audit*; 5) *Governing Bodies*, seperti diungkapkan oleh Rezaee (2003).

Untuk meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah dimulai dengan mewujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik. "Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik termasuk komitmen pimpinan daerah dan jajarannya (BPK Jabar, 2011).

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Komitmen kepala daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD

Keterbatasan

1. Model penelitian ini belum mampu menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas LKPD, masih terdapat 97,4 persen pengaruh yang berasal dari variabel-variabel yang tidak diteliti.
2. Peneliti tidak melakukan wawancara langsung dengan responden sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis.
3. Jumlah sampel yang kecil yaitu < 30 dapat menyebabkan nilai *margin of error* menjadi lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amitai Etzioni, 1961. A Comparative Analysis of Complex Organizations, New York: The Free Press.
- Ferdy Van Beest, Geert Braam, and Suzanne Boelens. 2009. Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics. *Nijmegen Center for Economics (NiCE)*. Working Paper 09-108 April
- Hunt, D. Shelby, and Morgan, M. Roberth. 1994. Organizational Commitment: one of Many Commitments or Key Mediating Construct. *Academy of Management Journal*. Vol. 3 pp. 12-37.
- Masmudi, 2003, Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Volume 3 nomor 1
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. Edisi-2. Jakarta LPE3ES.
- McDaniel. Linda, Roger D Mrtin and Lauren A. Maines. 2002. Evaluating Financial Reporting Quality. *Accounting Review*. December 1
- Mowday, R.T, Steers R.M dan Porter,L.W. 1979. Measurement Commitment of Organizational. *Journals Vocational Behavior* 12 224-247
- Porter,L.W, Steers, R.M, Mowday, R.T, and Boulivan, P.V. 1974. Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Among Psychiatric Technicians. *Journal of Applied Psychology* 59 (5); 603-9.
- PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Siegel, S. 1997. Statistik Nonparametrik untuk Ilmu-Ilmu sosial. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta
- Kurniawan Selamat. 2011. BPK RI Beri Opini WDP terhadap LKPD Enam Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabar. *Siaran Pers Penyerahan LHP-LKPD TA 2010*. Juli 2011. Bandung
- Solikin Ahmad. 2005. Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2. No.2 November 2006.
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007
- Sri Trisnarningsih. (2004). Independensi Auditor, Komitmen Organisasi, sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Universitas Dipenogoro*. Semarang
- Stephen J. Gauthier. (2007). Interpreting Local Government Financial Statement. *Government Finance Review*.
- Suharsimi Arikunto, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi IV. Rieneka Cipta Jakarta.
- Sugiyono. 2008. Metodologi Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Syafri Adnan Baharuddin. 2011. Peran hasil audit BPK dalam memberikan keyakinan atas penyajian laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Materi disampaikan pada RA Ke-5 IAI-KASP Juli 2011.
- Trihartono . 2006. Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit sebagai Unsur Penilai Kinerja Manajemen Kantor Cabang. Universitas Dipenogoro.
- Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara
- UU nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Zabihollah Rezaee. 2003. The Six Legged Stool. *Strategic Finance*. February